



# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Tahun **2020**  
Provinsi Sulawesi Tenggara





# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA Tahun **2020** Provinsi Sulawesi Tenggara



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA





# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2020 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**ISBN** : 987-602-5407-66-6  
**No. Publikasi** : 74000.2154  
**Katalog BPS** : 4601006.74  
**Ukuran Buku** : A5 (21 x 14,8 cm)  
**Jumlah Hal.** : vi + 36

**Naskah:**

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

**Penyunting Gambar:**

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

**Gambar Kulit:**

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

**Ilustrasi:**

Freepik

**Diterbitkan Oleh:**

©BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

**Pencetak:**

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasi, dan/atau menggandakan atau sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# KATA PENGANTAR

Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Booklet ini berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar aspek, variabel dan indikator IDI di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Materi yang disajikan dalam Booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variabel dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tenggara



Agnes Widiastuti





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Pendahuluan .....	1
Metodologi .....	7
Hasil IDI 2020 .....	17





A large orange triangle pointing to the right, containing a large black number '1' and the word 'PENDAHULUAN' in white. A faint watermark 'https://...' is visible across the triangle.

1

**PENDAHULUAN**



**“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**  
adalah angka yang menunjukkan  
tingkat perkembangan demokrasi di  
seluruh provinsi di Indonesia”

# LATAR BELAKANG

1

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi sehingga mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan aspek-aspek demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga aspek yang lain tidak diperhatikan.

2

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilaksanakan hampir 20 tahun, telah menciptakan keragaman segala aspek regional, salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi yang dapat mengarah pada menurunnya nilai-nilai demokrasi.

3

Dalam amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), salah satu tugas Bappenas adalah membuat perencanaan pembangunan yang memperkuat upaya konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi. Karena itu, Bappenas memerlukan alat untuk menilai keadaan demokrasi sampai tingkat daerah.

4

Sejak tahun 2009, BPS bekerjasama dengan BAPPENAS, KEMENKOPOLHUKAM, KEMENDAGRI, UNDP dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran IDI.

# TUJUAN



## ***Growth***

Melihat perkembangan demokrasi dari peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.



## ***Measure***

Menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia hingga level Provinsi



## ***Instrument***

Sebagai instrumen perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

# MANFAAT

Secara akademis, dapat menunjukkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan dan wartawan

Bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Bagi pemerintah dan masyarakat di provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang kurang baik dapat menarik pelajaran dari indikator-indikator demokrasi yang bernilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang.

An orange triangle pointing to the right, containing a large black number '2' and the word 'METODOLOGI' in white. A faint watermark 'https://...' is visible across the triangle.

2

**METODOLOGI**





# Komponen IDI

Aspek	Variabel	Indikator
<b>Kebebasan Sipil</b>	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator (1 & 2)
	Kebebasan Berpendapat	2 indikator (3 & 4)
	Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator (5, 6 & 7)
	Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator (8,9 &10)
<b>Hak-hak Politik</b>	Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator (11, 12, 13, 14 &15)
	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	2 indikator (16 & 17)
<b>Lembaga Demokrasi</b>	Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator (18 & 19)
	Peran DPRD	3 indikator (20, 21 & 22)
	Peran Partai Politik	2 indikator (23 & 24)
	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator (25 & 26)
	Peran Peradilan yang Independen	2 indikator (27 & 28)

# INDIKATOR IDI, ASPEK KEBEBASAN SIPIL

No	Indikator
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
3	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok

# INDIKATOR IDI, ASPEK HAK-HAK POLITIK

No	Indikator
11	Hak memilih atau dipilih terhambat
12	Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14	Voters Turnout
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

# INDIKATOR IDI, ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

No	Indikator
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19	Kecurangan dalam penghitungan suara
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
24	Persentase perempuan pengurus partai politik
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
27	Keputusan hakim yang kontroversial
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

# METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data IDI merupakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif (triangulasi). Tahapan yang ada dalam pengumpulan ini merupakan tahapan yang dilakukan secara berurutan dimana setiap tahapan merupakan *follow up* mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memperdalam, memperkaya) dari tahapan sebelumnya



- Koding Surat Kabar
- Koding Dokumen

*Focus Group  
Discussion (FGD)*

Wawancara  
Mendalam



## **KODING SURAT KABAR**

Mendokumentasikan semua peristiwa terkait indikator IDI yang diberitakan pada surat kabar yang telah dipilih dimana surat kabar tersebut memiliki oplah yang tertinggi di masing-masing provinsi. Di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dipilih surat kabar Kendari POS.



## **KODING DOKUMEN**

Mendokumentasikan semua dokumen tertulis yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, press release, Perda, juga dapat berupa surat edaran, SK atau Peraturan Kepala Daerah.



## **FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

Merupakan tahapan untuk mengklarifikasi data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama, sehingga data pada tahap pertama dapat dikoreksi, dengan menghadirkan beberapa pemangku kepentingan utama sehingga dapat merepresentasikan keterwakilan dari unsur pemerintah, kelompok fraksi, kalangan pers, LSM, pemuda dan mahasiswa, tokoh politik, akademisi, tokoh adat/agama, kelompok marginal dan wanita.



## **WAWANCARA MENDALAM**

Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media dan dokumen serta FGD. Narasumber ditentukan melalui pengindentifikasian partisipan yang dianggap layak pada FGD, seperti tokoh masyarakat, aktivis LSM, tokoh agama, pengurus partai politik/DPRD, akademisi, pemerintah daerah dan penegak hukum

## MAKNA NILAI IDI

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif, dengan 0 untuk menggambarkan tingkat terendah dan 100 untuk menggambarkan tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Indeks	Makna
> 80	kinerja demokrasi tinggi (baik)
60 – 80	kinerja demokrasi sedang
< 60	kinerja demokrasi rendah (buruk)





An orange triangle pointing to the right, containing a large black number 3 and the text 'HASIL IDI 2020'.

**3**

**HASIL IDI 2020**



# 67,73

Nilai IDI Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 adalah sebesar 67,73. Nilai ini lebih tinggi 2,52 poin dari tahun 2019 yang bernilai 65,21. Meskipun meningkat, nilai ini masih lebih rendah dari nilai IDI nasional yang bernilai 73,66. Nilai ini terbentuk dari 3 aspek berikut:

Kebebasan sipil

84,61

Hak politik

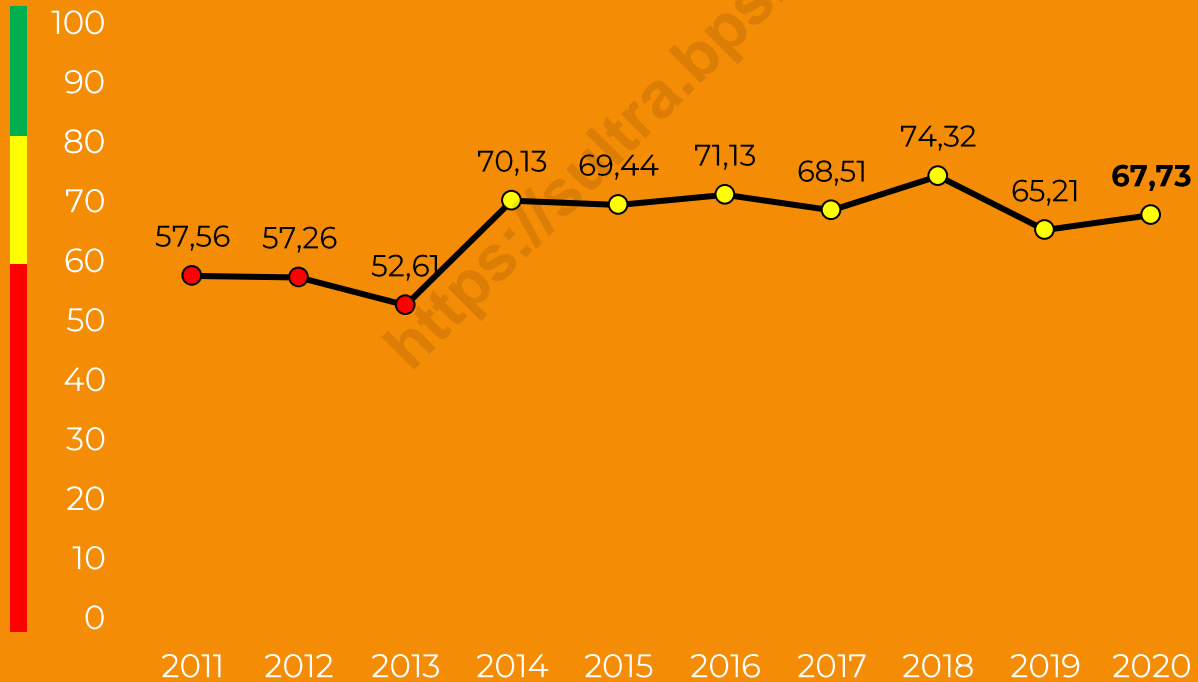
53,61

Lembaga demokrasi

68,92



# PERKEMBANGAN IDI SULTRA 2011-2020



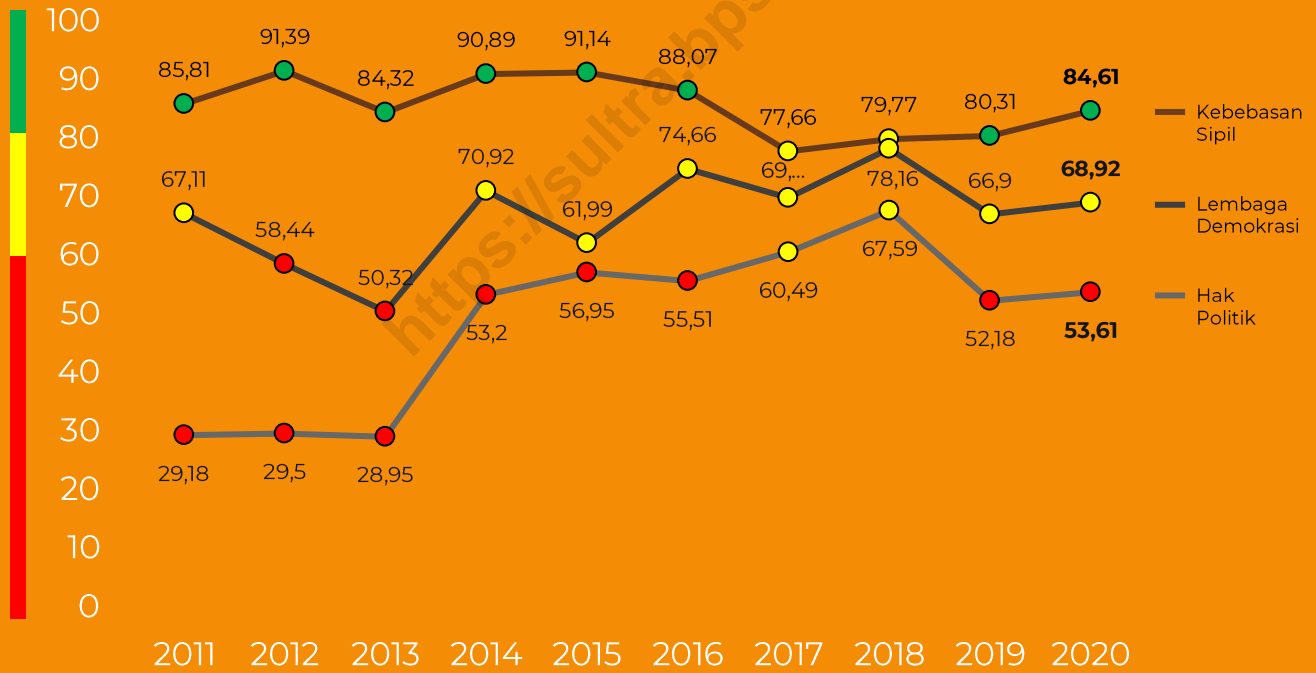
## PERKEMBANGAN IDI SULTRA 2011-2020



Sejak 2011 hingga 2020 IDI Sulawesi Tenggara tercatat mengalami fluktuasi. Dalam rentang 10 tahun penghitungan IDI, nilai IDI Sulawesi Tenggara berada pada titik terendah pada tahun 2013 (52,61) serta mencapai nilai tertinggi pada tahun 2018 (74,32). Fluktuatifnya angka IDI merefleksikan cerminan dinamika situasi demokrasi di wilayah Sulawesi Tenggara. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional.



# PERKEMBANGAN ASPEK IDI SULTRA 2011-2020



# PERKEMBANGAN ASPEK IDI SULTRA 2011-2020



## Nilai Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2020: 84,61

Nilai aspek kebebasan sipil di tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 sebanyak 4,3 poin. Peningkatan ini telah terjadi terus menerus dari tahun 2017. Nilai aspek Kebebasan Sipil antara tahun 2011 – 2020 secara umum cenderung stabil di kirsaran angka nilai 70 – 90an. Nilai aspek ini selalu berada dalam kategori baik kecuali di tahun 2017 dan 2018.



## Nilai Aspek Hak Politik Tahun 2020: 53,61

Nilai aspek hak politik di tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1,43 poin. Nilai tersebut naik setelah sebelumnya melonjak turun antara tahun 2018 – 2019. Nilai aspek hak politik antara tahun 2011 – 2013 cenderung stabil pada nilai 28 – 29an, namun kemudian melonjak drastis di tahun 2014 hingga sekarang dan stabil di angka 50 – 60an, kecuali pada tahun 2017 – 2018 yang meningkat hingga diatas angka 60 dan memasuki kategori sedang, namun kembali lagi menjadi karegori buruk setelah tahun 2018.



## Nilai Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2020: 68,92

Nilai aspek kebebasan sipil di tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 sebanyak 2,02 poin. Nilai tersebut naik setelah sebelumnya melonjak turun antara tahun 2018 – 2019. Nilai aspek hak politik antara tahun 2014 – 2020 secara umum cenderung stabil di kirsaran angka nilai 60 – 75an setelah sebelumnya mengalami tren menurun antara tahun 2011 – 2013. Nilai aspek ini selalu berada dalam kategori sedang kecuali di tahun 2012 dan 2013.

# PERKEMBANGAN VARIABEL IDI SULTRA 2019-2020

Variabel	2019	2020	
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	97,66	-2,34
Kebebasan Berpendapat	41,68	33,33	-8,35
Kebebasan Berkeyakinan	75,57	84,61	9,04
Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	100,00	0
Hak Memilih dan Dipilih	78,47	78,88	0,41
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	25,89	28,34	2,45
Pemilu yang Bebas dan Adil	84,58	84,58	0
Peran DPRD	64,38	75,62	11,24
Peran Partai Politik	100,00	100,00	0
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	45,41	44,56	-11,24
Peran Peradilan yang Independen	50,00	50,00	0



# PERKEMBANGAN VARIABEL IDI SULTRA 2019-2020



Terjadi peningkatan nilai IDI pada 4 variabel, yaitu Kebebasan Berkeyakinan, Hak Memilih dan Dipilih, Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan, dan Peran DPRD. Dimana selisih yang cukup besar terjadi pada variabel Kebebasan Berkeyakinan dan Peran DPRD.



Terjadi penurunan nilai IDI pada 3 variabel, yaitu Kebebasan Berkumpul dan Berkeyakinan, Kebebasan Berpendapat, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Dimana penurunan yang tinggi terjadi di dua variabel, yaitu Kebebasan Berpendapat dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah



Skor tidak berubah dialami oleh empat variabel, yaitu Kebebasan dari Diskriminasi, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, dan Peran Peradilan yang Independen. Meskipun tidak mengalami perubahan, dua variabel telah memiliki nilai 100 yaitu Kebebasan dari Diskriminasi dan Peran Partai Politik,

# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI SULTRA 2019-2020

No	INDIKATOR	2019	2020
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	81,25
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	37,50	37,50
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	62,50	12,50
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	78,26	78,26
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	43,75	100,00
7	Ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama	85,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00

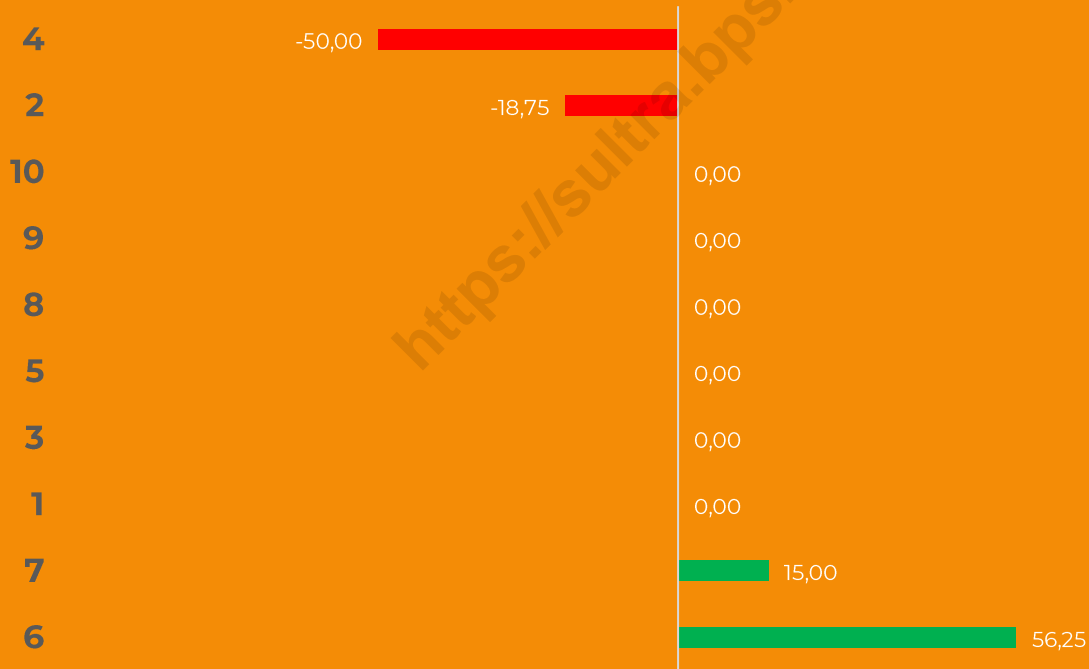
# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI SULTRA 2019-2020

No	INDIKATOR	2019	2020
11	Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	91,67	91,67
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak mendapat hak memilih	96,55	96,55
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	73,43	73,43
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu	82,55	82,55
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi	59,27	63,50
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	18,48	8,70
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	33,30	47,98

# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI SULTRA 2019-2020

No	INDIKATOR	2019	2020
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	81,82	81,82
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	87,34	87,34
20	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan Kesehatan thd total APBD	79,48	90,08
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	72,72	100,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	3,57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	100,00
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00
25	Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	89,47	57,89
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	33,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	0,00

# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI ASPEK KEBEBASAN SIPIL SULTRA 2019-2020

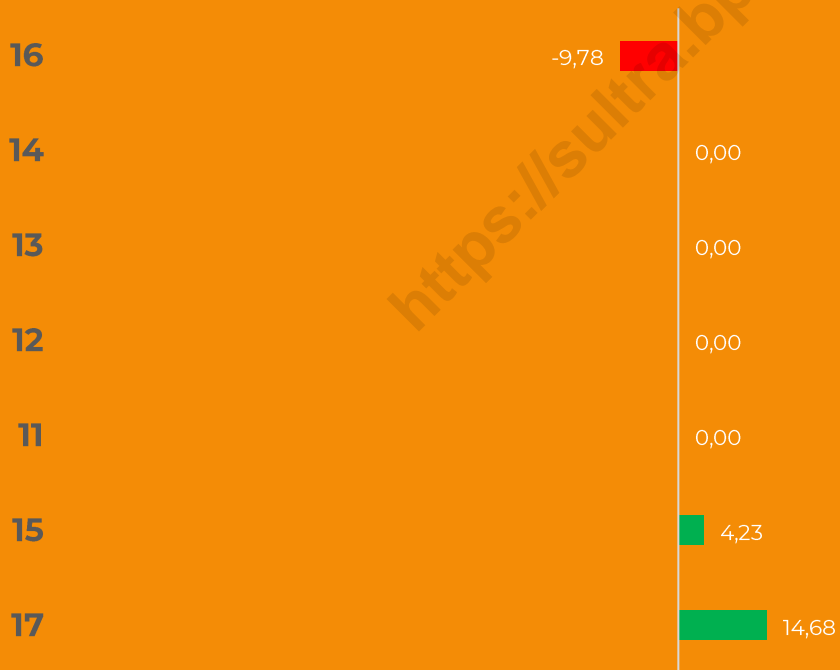


# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI ASPEK KEBEBASAN SIPIL SULTRA 2019-2020



Pada aspek kebebasan sipil, terdapat 2 indikator yang meningkat, 2 indikator yang menurun, dan 6 indikator yang tetap. Namun untuk indikator 1, 8, dan 10 telah mencapai skor maksimum sehingga tujuan telah tercapai untuk indikator-indikator tersebut. Namun, untuk indikator lainnya masih diharapkan untuk meningkat, khususnya indikator 4 yang turun sebanyak 50 poin.

# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI ASPEK HAK POLITIK SULTRA 2019-2020



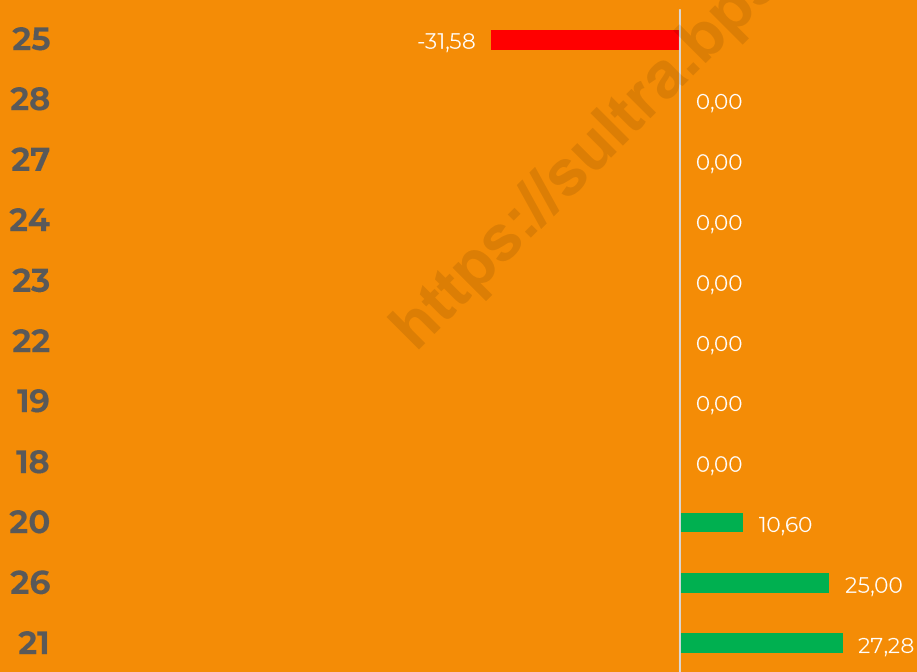
# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI ASPEK HAK POLITIK SULTRA 2019-2020



Pada aspek hak-hak politik, terdapat 2 indikator yang meningkat, 1 indikator yang menurun, dan 4 indikator yang tetap. Tidak ada indikator yang telah meraih angka maksimal, sehingga nilai indikator pada aspek hak-hak politik masih diharapkan meningkat. Hal ini juga berlaku pada indikator 17 yang walaupun meningkat, skor yang diperoleh pada tahun 2020 masih rendah, yaitu 47,98.



# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI LEMBAGA DEMOKRASI SULTRA 2019-2020



# PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI LEMBAGA DEMOKRASI SULTRA 2019-2020



Pada aspek kebebasan sipil, terdapat 3 indikator yang meningkat, 1 indikator yang menurun, dan 7 indikator yang tetap. Namun untuk indikator 21, 23, dan 27 telah mencapai skor maksimum sehingga tujuan telah tercapai untuk indikator-indikator tersebut. Namun, untuk indikator lainnya masih diharapkan untuk meningkat, khususnya indikator 25 yang turun sebanyak 31,58 poin, indikator 22 yang masih bernilai 3,57 poin, serta indikator 28 yang bernilai 0 poin.

# SKOR INDIKATOR IDI SULTRA 2020 YANG MASIH BERKATEGORI BURUK

**37,50**

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

**12,50**

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

**8,70**

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

**47,98**

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

**3,57**

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

**57,89**

Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh putusan PTUN

**33,33**

Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

**0,00**

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1 Kecamatan Kambu Kendari 93231  
Telp. (0401) 3121751 - 3135363 Fax. (0401) 3122355  
Email: [bps7400@bps.go.id](mailto:bps7400@bps.go.id) Homepage: <http://sultra.bps.go.id>